

**ANALISIS PERTUMBUHAN DAN
KETIMPANGAN ANTAR KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2001-2009**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

**DEVI YANTI RAHAYU SITORUS
NIM. C2B007013**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2012**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Devi Yanti Rahayu Sitorus
Nomor Induk Mahasiswa : C2B007013
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/IESP
Judul Skripsi : **ANALISIS PERTUMBUHAN DAN
KETIMPANGAN ANTAR
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2001-2009**
Dosen Pembimbing : Drs. R. Mulyo Hendarto, MSP.

Semarang, 2012

Dosen Pembimbing,

(Drs. R. Mulyo Hendarto, MSP.)
NIP.196104161987101001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama : Devi Yanti Rahayu Sitorus
Nomor Induk Mahasiswa : C2B007013
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/IESP
Judul Skripsi : **ANALISIS PERTUMBUHAN DAN
KETIMPANGAN ANTAR
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2001-2009**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 2012

Tim Penguji :

1. Drs. R. Mulyo Hendarto, MSP (.....)
2. Evi Yulia P, SE. MSi (.....)
3. Drs. Nugroho SBM, MT (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Devi Yanti Rahayu Sitorus, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : Analisis Pertumbuhan dan Ketimpangan Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2001-2009, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan tulisan aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 2012
Yang membuat pernyataan,

(Devi Yanti Rahayu Sitorus)
NIM. C2 B007 013

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Great is Thy Faithfulness, O god my Father
There is no shadow of turning with Thee;
Thou changest not, Thy compassions they
As Thous has been Thou for will be
Great is Thy faithfulness
Great is Thy faithfulness
Morning by Morning new mercies I see
All I have needed Thy hand had provided
Great is Thy faithfulness, Lord unto me
Summer and winter, and springtime and harvest,
Sun, moon and stars in their courses above
Join with all nature in manifold witness
To Thy great faithfulness, mercy and love
Pardon for sin and a peace that endureth,
Thy own dear presence to cheer and to guide
Strenght for today and bright hope for tomorrow
Blessings all mine, with ten thousand beside

(By William M. Runyan)

*Skripsi ini kupersembahkan untuk Bapak dan Mamak, abang, serta adik-adikku.
Mengucap syukur bisa menjadi bagian dari kehidupan keluarga ini.*

ABSTRACT

Any economic development expects the creation of high economic growth and equity. East Kalimantan province from the year of 2001-2009 shows the economic growth is volatile and tends to decline on average by 2,77 percent while economic growth in the district / city looks lame, some are experiencing positive growth and even negative, while the differences of GDP per capita are quite striking between regions. This shows the disparity between urban districts in the province of East Kalimantan.

This study aims to analyze the income's disparity that occurred between the district / city in East Kalimantan Province in the year of 2001-2009. The data used for this study is secondary data. Meanwhile, The analytical method used was Typology Klassen, and Williamson index.

Based on the Analysis of Klassen Typology shows the majority of as nine district / city include the fast growing area. These results indicate that during the year between 2001-2009 had occurred disparity and fluctuated annually and tend to decline, but still relatively high in East Kalimantan province with an average of 0,828. The highest disparity occurred in 2001 at 0,916 and the lowest disparity occurred in the year of 2009 at 0,731.

Key Words : Economic Growth ,Regional Disparity Klassen Typology, Williamson Index, Kalimantan Timur

ABSTRAKSI

Setiap pembangunan ekonomi mengharapkan terciptanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan. Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2001-2009 mengalami pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif serta cenderung menurun yaitu rata-rata sebesar 2,77 persen sedangkan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota terlihat timpang, ada yang mengalami pertumbuhan yang positif bahkan negatif dan perbedaan PDRB per kapita yang cukup mencolok antar daerah. Hal ini memperlihatkan terjadinya ketimpangan antar kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Timur.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketimpangan pendapatan yang terjadi antar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2001-2009. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah Tipologi Klassen, dan Indeks Williamson.

Berdasarkan Analisis Tipologi Klassen memperlihatkan sebagian besar kabupaten/kota masuk daerah berkembang cepat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama tahun 2001-2009 terjadi ketimpangan dan berfluktuatif setiap tahunnya serta cenderung menurun, tapi masih tergolong tinggi di Provinsi Kalimantan Timur dengan rata-rata sebesar 0,828. Ketimpangan yang paling tinggi terjadi pada tahun 2001 sebesar 0,916 dan ketimpangan yang paling rendah terjadi pada tahun 2009 sebesar 0,731.

Kata kunci : Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Regional, Tipologi Klassen, Indeks Williamson, Kalimantan Timur

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Kasih setiaNya dan KaruniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PERTUMBUHAN DAN KETIMPANGAN ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2001-2009”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam proses penyelesaian skripsi, banyak pihak yang telah berperan memberikan bimbingan, arahan kritik, dorongan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih dengan tulus kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Mohamad Nasir, M.Si., Ak., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Drs. R. Mulyo Hendarto, MSP, selaku dosen pembimbing. Terimakasih atas bimbingan, solusi dan kebijaksanaannya.
3. Ibu Evi Yulia P, SE.Msi dan Bapak Drs. Nugroho SBM, MT selaku dosen penguji. Terimakasih atas saran, kritik, dan bimbingannya.
4. Ibu Dra. Hj. Tri Wahyu Rejekiningsih, M.Si, selaku dosen wali. Terimakasih atas bimbingannya selama ini.
5. Dosen-dosen IESP FEB UNDIP, terimakasih atas ilmu dan pengetahuan yang selama ini diberikan.

6. Untuk keluargaku tercinta :
Kedua orang tuaku, Bapak B. Sitorus dan Ibu R. Simamora, terimakasih untuk cinta dan dukungan kalian (*I'm apologize for this late graduation, I Love both you*). Abangku, Harman R. Sitorus (*Thanks for being my Big brother, who always support me*), my twin sisters Mega Ester Sitorus dan Wira Tarmi Sitorus (*Thanks for being my little sisters and help me searched data*), my little brother, Klinsmann Ardianto Sitorus (*just prove that you'll grab it*), namboruku di Bontang, Rusti Sitorus, Tulang Nico, dan semua keluarga jauh yang ada di Sumatera, terimakasih untuk dukungan dan doanya.
7. Keluarga Bapa tua/Inang tua sitorus di Banyumanik, Bapa tua/Inang tua di Tanah Mas, dan keluarga besar Sitorus di Semarang, terimakasih untuk dukungan dan doanya.
8. Para petugas perpustakaan dan para pegawai TU yang membantu kelancaran kegiatan akademik di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
9. Ibu Ida di BPS Provinsi Kalimantan Timur, terimakasih untuk bantuan ibu dalam memberikan data.
10. Ibu Lisa, Ibu Illa, Ibu Citra dan Pak Saor yang ada di BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur, terimakasih untuk bantuan bapak/ibu dalam memberikan data dan wawancara.

11. Bapak Fedriansyah, Bapak Puji, Bapak Teguh, dan Bapak Ahma di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur, terimakasih atas bantuan bapak dalam memberikan data.
12. Bapak Tobing dan Mas Taufik di Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur, terimakasih atas bantuan bapak dalam memberikan data.
13. Arif, Suryanto , Lidya , Ridwan ,dan Dolly. (*Always keep in touch although distance and time will separate us and we will run our life for each self to grab our dreams*).
14. Buat Bang Lamhot , Kak rodo, Bang Marfin, Kak Shandy, Moris, Yohanna , Tiwi, Anisa, Adit, Lina, Viko, Gladys, Friska, Henny, Dina, Velin, Friska, Lukita, Arwani, Syahira, eveline *and other friends that I can't mention one by one your name here. Love you all, thanks for your supports.*
15. Mbak Tyas, Mbak Atik dan teman-teman Navigator, terimakasih atas kebaikan dan dukungan kalian.
16. Teman-Teman IESP 2007, sukses buat kita semua.
17. Teman-Teman Kos Cantik Tembalang 59, Retnozul, Lidya, Nena, Sinta, Astuti, Dina, Infra, Metta, Retnowati, terimakasih buat pertemanan di kos dan sampai bertemu di lain kesempatan.
18. Teman-teman Persekutuan Mahasiswa Kristen (PMK) FE Diponegoro, terimakasih telah menjadi bagian keluarga besar ini di kampus dan diberi kesempatan bekarya bersama.
19. Adit dan Syahira, terimakasih membantu penulis dalam hal pembuatan peta.

20. Teman KKN Kelurahan Bungangan 2010, terimakasih atas tiga puluh lima hari menjadi tim yang kompak.
21. Teman-teman Naposo HKBP Kertanegara, terimakasih untuk dukungan dan kesempatan bisa berkarya bersama teman-teman semua.
22. HKBP Kertanegara khususnya bidang seksi musik, terimakasih amang, inang serta teman-teman bisa berkesempatan bekerjasama dengan kalian.
23. Murid –murid les :Elyse,Kiara, Nadira,Bu Ningrum, dkk (*glad I have known you and shared the knowledges with you all*).

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam pembuatan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Semarang, 28 Juni 2012

Penulis

Devi Yanti R.Sitorus

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
<i>ABSTRAKSI</i>	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	17
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	18
1.4 Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TELAAH PUSTAKA	21
2.1 Landasan Teori.....	21
2.1.1 Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi.....	21
2.1.2 Pembangunan Ekonomi Daerah.....	22
2.1.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi	23
2.1.3.1 Teori Ekonomi Klasik	24
2.1.3.2 Teori Harrod Domar-dalam Sistem Regional	25
2.1.3.3 Teori Pertumbuhan Neoklasik	26
2.1.4 Teori Basis Ekonomi.....	28
2.1.5 Tipologi Klassen.....	28
2.1.6 Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar Daerah	30
2.1.7 Hipotesis Kuznets	36
2.2 Penelitian Terdahulu.....	38
2.3 Kerangka Pemikiran.....	41
BAB III METODE PENELITIAN	43
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	43
3.1.1 Pertumbuhan Ekonomi.....	43
3.1.2 Ketimpangan Pendapatan.....	43
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	44
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	45
3.4 Metode Analisis Data.....	46
3.4.1 Analisis Pertumbuhan Ekonomi Daerah	46

3.4.2	Analisis Tingkat Ketimpangan Antar Daerah.....	47
BAB IV	HASIL DAN ANALISIS.....	49
4.1	Deskripsi Objek Penelitian.....	49
4.1.1	Keadaan Geografis.....	49
4.1.2	Keadaan Demografis.....	51
4.1.3	Sumber Daya Alam.....	53
4.1.5	Sarana dan Prasarana.....	61
4.1.6	Tenaga Kerja.....	62
4.1.7	Investasi.....	63
4.1.8	Kondisi Perekonomian	66
4.1.8.1	PDRB dan Laju PDRB Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2001-2009.....	67
4.1.8.2	Perkembangan PDRB Per Kapita Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2001-2009	72
4.1.8.3	PDRB dan Laju PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2001-2009.....	73
4.1.8.4	Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2001-2009.....	77
4.2	Analisis Data.....	78
4.2.1	Analisis Tipologi Klassen.....	78
4.2.2	Analisis Indeks Williamson	85
4.3	Interpretasi Hasil.....	86
BAB V	PENUTUP	99
5.1	Simpulan.....	99
5.2	Keterbatasan.....	100
5.3	Saran	101
	DAFTAR PUSTAKA	102
	LAMPIRAN.....	104

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto ADHK 2000 di Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia Tahun 2006-2009.....	3
Tabel 1.2 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Provinsi di Pulau Kalimantan Tahun 2006-2009 (Miliar Rupiah).....	5
Tabel 1.3 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2006-2009 (Juta Rupiah)	6
Tabel 1.4 Jumlah Perusahaan Menurut Lokasi di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.....	7
Tabel 1.5 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Provinsi di Pulau Kalimantan ADHK 2000 Tahun 2006-2009 (Persen)	8
Tabel 1.6 PDRB Kabupaten/Kota ADHK 2000 di Provinsi Tahun 2001-2009 (Juta Rupiah)	9
Tabel 1.7 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2000 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2006-2009 (Persen).....	11
Tabel 1.8 PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2006-2009 (Rupiah)	12
Tabel 1.9 Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2006-2009 (Jiwa).....	13
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	40
Tabel 3.1 Pengelompokan Pembangunan Wilayah berdasarkan Tipologi Klassen.....	47
Tabel 4.1 Luas Wilayah dan Kondisi Kependudukan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2001,2009.....	52
Tabel 4.2 Realisasi Minyak Bumi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2009 (Ribu Barel).....	54

Tabel 4.3	Realisasi Produksi Gas Alam Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2004-2009 (Ribu MMBTU).....	55
Tabel 4.4	Rata-Rata Realisasi Produksi Batu Bara Menurut Perusahaan dan Lokasi di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2009 (Ton).....	59
Tabel 4.5	Infrastruktur Jalan Berdasarkan Jenis Aspal dan Kondisinya Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009(km)..	62
Tabel 4.6	Angkatan Kerja, TPAK, dan TPT Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009	63
Tabel 4.7	Persetujuan dan Realisasi PMDN Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2009	64
Tabel 4.8	Persetujuan dan Realisasi PMA Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2009.....	66
Tabel 4.9	PDRB Menurut Lapangan Usaha ADHK Tahun 2000 Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2001-2009 (Juta Rupiah).....	67
Tabel 4.10	Kontribusi Sektor Ekonomi ADHK Tahun 2000 Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2001-2009	69
Tabel 4.11	Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2001-2009 (Persen)	71
Tabel 4.12	PDRB Per Kapita Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2001-2009 (Rupiah).....	73
Tabel 4.13	Rata-Rata PDRB Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2001-2009 (Juta rupiah)	74
Tabel 4.14	Pertumbuhan PDRB Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2001-2009.....	76
Tabel 4.15	Rata-Rata PDRB Per Kapita Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2001-2009 (Rupiah)	78
Tabel 4.16	Pembagian Wilayah Berdasarkan Tipologi Klassen di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2001-2009	79
Tabel 4.17	Indeks Williamson dan Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2001-2009	85

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	42
Gambar 4.1 Peta Administratif Provinsi Kalimantan Timur	50
Gambar 4.2 Peta Persebaran Produksi Minyak Bumi di Provinsi Kalimantan Timur	56
Gambar 4.3 Peta Persebaran Produksi Gas Alam di Provinsi Kalimantan Timur	57
Gambar 4.4 Peta Persebaran Perusahaan Produksi Batu Bara di Provinsi Kalimantan Timur	60
Gambar 4.5 Perkembangan PDRB Migas dan Non Migas Tahun 2001-2009	68
Gambar 4.6 Kontribusi PDRB Provinsi Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha Tahun 2001 dan 2009 (Persen).....	70
Gambar 4.7 Pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2001-2009.....	72

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur	105
Lampiran B Perkembangan Produksi Batu Bara di Provinsi Kalimantan...	119
Lampiran C Persetujuan dan Realisasi PMA dan PMDN	120
Lampiran D Hasil Analisis Tipologi Klassen	124
Lampiran E Hasil Analisis Indeks Williamson	133
Lampiran F Wawancara dengan <i>Key Person</i>	142

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap mental yang sudah terbiasa dan lembaga-lembaga nasional termasuk pula percepatan atau akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan dan pemberantasan kemiskinan yang absolut (Todaro, 2006). Dalam pengertian secara tradisional, pembangunan semata-mata dipandang sebagai fenomena ekonomi saja. Tinggi rendahnya pembangunan di suatu negara hanya diukur berdasarkan tingkat pertumbuhan Produk Nasional Bruto (PNB), baik secara keseluruhan maupun per kapita, yang dipercaya dapat menetes dengan sendirinya (*trickle down effect*) sehingga menimbulkan munculnya lapangan pekerjaan dan peluang ekonomi lainnya dan pada akhirnya akan menumbuhkan berbagai kondisi yang diperlukan demi tercapainya distribusi hasil-hasil pertumbuhan ekonomi dan sosial secara lebih merata (Todaro, 2006). Sedangkan menurut Sadono Sukirno (1985) pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Sehingga baik pertumbuhan maupun pendapatan per kapita merupakan dua unsur yang paling diutamakan tanpa memperhatikan aspek lain seperti diskriminasi, pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan distribusi pendapatan yang sering diabaikan.

Menurut Todaro (2006) di negara sedang berkembang perhatian utama terfokus pada dilema antara pertumbuhan dan pemerataan. Pembangunan ekonomi mensyaratkan Produk Nasional Bruto (PNB) yang lebih tinggi dan juga pertumbuhan yang lebih tinggi merupakan suatu pilihan yang harus diambil. Namun yang menjadi masalah adalah bukan hanya soal bagaimana caranya memacu pertumbuhan, tetapi juga siapa yang melaksanakan dan berhak menikmati hasilnya. Dengan demikian pembangunan ekonomi tidak semata-mata diukur berdasarkan peningkatan PNB secara keseluruhan, tetapi harus memperhatikan distribusi pendapatan telah menyebar ke segenap penduduk atau lapisan masyarakat, serta siapa yang telah menikmati hasil-hasilnya.

Tolok ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan semakin kecilnya kesenjangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor. Isu kesenjangan ekonomi telah banyak menjadi bahan penelitian para ahli ekonomi. Menurut Mudrajad Kuncoro (2006) ketimpangan ekonomi dapat dilihat dari tiga dimensi, yaitu: berdasarkan tingkat kemodernan, regional, dan etnis. Pertama, kesenjangan dari tingkat kemodernan, yaitu kesenjangan antara sektor modern dan sektor tradisional. Kedua, kesenjangan regional adalah kesenjangan antara Katimin (Kawasan Timur Indonesia) dan Kabarin (Kawasan Barat Indonesia). Ketiga, kesenjangan menurut etnis yaitu antara pribumi dan nonpribumi.

Pembangunan dalam lingkup negara secara spasial tidak selalu merata. Kesenjangan antar daerah seringkali menjadi permasalahan serius. Beberapa daerah mencapai pertumbuhan cepat, sementara beberapa daerah lainnya

mengalami pertumbuhan yang lambat. Selama empat tahun dari tahun 2006-2009 (Tabel 1.1), penyelenggaraan ekonomi daerah 33 provinsi mengalami fluktuasi yaitu pada tahun 2006 sebesar 5,19 persen kemudian meningkat di tahun 2007 sebesar 5,67 persen, tahun 2008 meningkat sebesar 6,43 dan pada tahun 2009 menurun menjadi 4,74. Sementara pada pertumbuhan ekonomi nasional, juga berfluktuatif yaitu pada tahun 2006 sebesar 5,50 persen meningkat di tahun 2007 sebesar 6,35 persen dan mengalami penurunan di tahun 2008 sebesar 6,01 dan juga 2009 menjadi 4,55 persen, penurunan ini dimungkinkan terjadi karena sejak adanya krisis global yang terjadi di akhir tahun 2008.

Tabel 1.1
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto ADHK* 2000
Di Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia
Tahun 2006-2009 (persen)

No	Provinsi	Tahun				rata-rata
		2006	2007	2008	2009	
1	Sumatera	5,26	4,96	4,98	3,5	4,68
2	Jawa	5,78	6,19	7,03	4,81	5,95
3	Bali	5,28	5,92	10,27	5,33	6,70
Kawasan Barat Indonesia						5,78
4	Kalimantan	3,8	3,51	5,2	3,35	3,97
5	Sulawesi	6,85	6,88	9,37	6,89	7,50
6	Nusa Tenggara, Maluku dan Papua	- 4,03	5,06	2,55	12,74	4,08
Kawasan Timur Indonesia						5,18
Jumlah 33 Provinsi		5,19	5,67	6,43	4,74	5,50
Indonesia		5,50	6,35	6,01	4,55	5,60

Sumber: bps.go.id

*) ADHK =Atas Dasar Harga Konstan

Masalah ketimpangan ekonomi antar daerah tidak hanya tampak pada wajah ketimpangan perekonomian Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa melainkan juga terjadi antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) yang diwakili oleh Pulau

Sumatera, Pulau Jawa dan Pulau Bali dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang diwakili oleh Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Pada Tabel 1.1 memperlihatkan dari tahun 2006-2009 pertumbuhan ekonomi di Kawasan Barat Indonesia rata-rata sebesar 5,78 persen yang terdiri dari Pulau Sumatera dengan pertumbuhan ekonomi 4,68 persen, Pulau Jawa dengan pertumbuhan ekonomi 5,95 persen dan Pulau Bali dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,70 persen. Angka pertumbuhan ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kawasan Timur Indonesia sebesar 5,18 persen. Di Kawasan Timur Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi dialami oleh Pulau Sulawesi sebesar 7,50 persen, kemudian Nusa Tenggara, Maluku, Papua sebesar 4,08 dan Kalimantan sebesar 3,97 persen.

Kesenjangan pembangunan yang terjadi antara KBI dan KTI juga terjadi disebabkan oleh beradanya Ibu Kota Indonesia yang terletak di Pulau Jawa yaitu Provinsi DKI Jakarta sebagai barometer perekonomian nasional. Dimana terkonsentrasinya berbagai aktivitas perekonomian berbagai macam sektor. Masalah ketimpangan regional tidak hanya tampak pada wajah ketimpangan antara KBI dan KTI, namun juga tampak dalam pembangunan antar wilayah di provinsi itu sendiri, sebagaimana halnya yang terjadi di Provinsi Kalimantan Timur.

Provinsi Kalimantan Timur merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Provinsi ini merupakan salah satu pintu pembangunan wilayah selain Provinsi Sulawesi Utara; Papua; Kalimantan Barat; dan NTT di wilayah

Indonesia Bagian Timur (IBT). Daerah yang dikenal kaya akan sumber daya alam, potensi kekayaan sumber daya alam yaitu hasil pertambangan seperti migas dan nonmigas sebagai penopang perekonomian terbesar beserta sektor ekonomi lainnya yang berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Tabel 1.2
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000
Menurut Provinsi di Pulau Kalimantan Tahun 2006-2009
(Miliar Rupiah)

No	Provinsi	PDRB Dengan Migas				Rata-Rata	
		2006	2007	2008	2009	Miliar Rupiah	Persen
1	Kalimantan Barat	24.768	26.261	27.683	29.002	26.928,50	15,82
2	Kalimantan Tengah	14.854	15.754	16.725	17.642	16.243,75	9,54
3	Kalimantan Selatan	24.452	25.922	27.539	28.919	26.708,00	15,69
4	Kalimantan Timur	96.613	98.386	103.206	103.207	100.353,00	58,95
Kalimantan		160.687	166.328	175.153	178.770	170.234,50	100,00
1	Kalimantan Barat	24.768	26.261	27.683	29.002	26.928,50	21,80
2	Kalimantan Tengah	14.854	15.754	16.725	17.642	16.243,75	13,15
3	Kalimantan Selatan	23.995	25.454	27.074	28.458	26.245,25	21,25
4	Kalimantan Timur	47.841	52.737	56.080	59.778	54.109,00	43,80
Kalimantan		111.458	120.206	127.562	134.880	123.526,50	100,00

Sumber: Statistik Indonesia, 2010

Berdasarkan Tabel 1.2, Provinsi Kalimantan Timur memiliki rata-rata kontribusi PDRB yang paling tinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Kalimantan yaitu dengan rata-rata sebesar 100.353 miliar rupiah (58,95 persen) dan perhitungan tanpa migas ialah sebesar 54.109 miliar rupiah (43,80 persen).

Kontribusi yang tinggi tersebut merupakan sumbangan yang didominasi dari hasil kekayaan sumber daya alam berupa hasil pertambangan dan penggalian (lihat Tabel 1.3), dilihat dari kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Timur tahun 2006-2009, dua sektor terbesar yang berkontribusi dalam PDRB Provinsi Kalimantan adalah sektor pertambangan dan

penggalian dan sektor industri pengolahan. Besar nilai masing-masing sektor dimana sektor pertambangan dan penggalian dengan rata-rata sebesar 39.600.715 juta rupiah (39,25 persen) kemudian sektor industri pengolahan dengan rata-rata sebesar 32.454.606 juta rupiah (32,17 persen).

Tabel 1.3
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2006- 2009 (Juta Rupiah)

No	Sektor	Tahun				Rata-rata	
		2006	2007	2008	2009	Juta Rupiah	Persen
1	Pertanian	6.534.679	6.651.355	6.844.815	6.947.066	6.744.479	6,68
2	Pertambangan dan Penggalian	37.290.991	38.321.837	40.527.150	42.262.880	39.600.715	39,25
3	Industri Pengolahan	33.230.139	31.946.299	32.975.825	31.666.162	32.454.606	32,17
4	Listrik,Gas dan Air Bersih	288.315	303.431	319.610	337.693	312.262	0,31
5	Bangunan	2.966.548	3.339.516	3.617.582	3.977.671	3.475.329	3,44
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	7.471.445	8.130.803	8.419.720	8.897.655	8.229.906	8,16
7	Pengangkutan dan Komunikasi	4.647.400	5.052.690	5.450.459	5.851.250	5.250.450	5,20
8	Keuangan/Persewaan dan Jasa Perusahaan	2.369.367	2.741.785	3.008.421	3.277.736	2.849.327	2,82
9	Jasa-jasa	1.813.958	1.898.665	2.043.292	2.150.697	1.976.653	1,96
Total PDRB		96.612.842	98.386.382	103.206.872	105.368.811	100.893.727	100

Sumber: BPS, Kalimantan Timur Dalam Angka Tahun 2007-2010

Terdapat beberapa industri-industri tambang besar di Provinsi Kalimantan Timur yang mengelola hasil tambang tersebut seperti PT. Total Indonesia, PT. Chevron, PT. Medco EP, PT.Badak Natural Gas Liquefaction, PT.Vico, PT. Kaltim Prima Coal (KPC), PT. Indominco Mandiri, dan sejumlah industri tambang lainnya baik yang dimiliki oleh atas nama badan maupun perorangan.

Tabel 1.4 menunjukkan banyaknya jumlah perusahaan pertambangan yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Jumlah perusahaan pertambangan paling banyak terdapat di daerah kabupaten dengan total 1.727 perusahaan (82,32 persen). Sedangkan di daerah kota dengan total 329 perusahaan (15,68 persen).

Banyak dan sedikitnya jumlah perusahaan pertambangan tersebut dipengaruhi oleh besar kecilnya potensi sumber daya alam yang ada di daerah itu sendiri.

Tabel 1.4
Jumlah Perusahaan Pertambangan Berdasarkan
Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan/Usaha
	Kabupaten	1.727
1	Pasir	655
2	Kutai Barat	94
3	Kutai Kartanegara	552
4	Kutai Timur	147
5	Berau	66
6	Malinau	42
7	Bulungan	179
8	Nunukan	23
9	Penajam Paser Utara	11
10	Tana Tidung	*
	Kota	329
11	Balikpapan	30
12	Samarinda	223
13	Tarakan	76
14	Bontang	-
	Total seluruhnya	2.098

Sumber : BPS, Direktori Perusahaan Pertambangan dan Penggalan sensus 2009

* = Data masih tergabung dengan Kabupaten Bulungan

Laju pertumbuhan PDRB dengan migas menunjukkan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai laju pertumbuhan ekonomi terendah dibandingkan dengan tiga provinsi yang lain di Pulau Kalimantan yaitu sebesar 2,92 persen, namun jika dibandingkan dengan laju PDRB tanpa migas memiliki rata-rata laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi di bandingkan dengan tiga provinsi lainnya yaitu sebesar 8,95 persen (lihat Tabel 1.5).

Tabel 1.5
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Provinsi di Pulau Kalimantan
Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2006- 2009
(persen)

No	Provinsi	Laju PDRB Dengan Migas				Rata-rata
		2006	2007	2008	2009	
1	Kalimantan Barat	5,23	6,02	5,42	4,76	5,36
2	Kalimantan Tengah	5,84	6,06	6,16	5,48	5,88
3	Kalimantan Selatan	4,98	6,01	6,23	5,01	5,55
4	Kalimantan Timur	2,85	1,84	4,90	2,09	2,92
		Laju PDRB Tanpa Migas				
1	Kalimantan Barat	5,23	6,02	5,42	4,76	5,36
2	Kalimantan Tengah	5,84	6,06	6,16	5,48	5,88
3	Kalimantan Selatan	5,05	6,08	6,37	5,11	5,65
4	Kalimantan Timur	12,62	10,23	6,34	6,59	8,95

Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2010

Kontribusi PDRB yang tinggi (lihat Tabel 1.5) belum diikuti dengan laju pertumbuhan yang tinggi . Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2006-2009 mengalami fluktuatif, tahun 2006 sebesar 2,85 persen dan pada tahun 2007 menurun menjadi 1,84 persen kemudian meningkat menjadi sebesar 4,90 persen pada tahun 2008 dan menurun kembali pada tahun 2009 menjadi sebesar 2,09 persen. Sedangkan pada kontribusi tanpa migas, laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur mengalami fluktuasi setiap tahunnya namun memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibandingkan dengan tiga provinsi yang lain.

Adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 revisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 revisi menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang otonomi daerah memberikan kewenangan terhadap Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

untuk merencanakan dan mengelola pembangunan daerahnya masing-masing berdasarkan potensi dan permasalahan wilayah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada setiap kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten/kota merupakan penopang bagi perekonomian provinsi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Tabel 1.6
PDRB Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Konstan 2000
Di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2006-2009
(Juta Rupiah)

No	Kabupaten	Tahun				rata-rata	
		2006	2007	2008	2009	Juta rupiah	persen
1	Kab.Pasir	3.709.866	4.189.093	4.486.554	4.833.229	4.304.686	3,98
2	Kab.Kutai Barat	2.521.799	2.684.532	2.868.001	3.065.519	2.784.963	2,57
3	Kab.Kutai Kartanegara	27.299.950	26.203.219	27.427.692	27.997.018	27.231.970	25,15
4	Kab.Kutai Timur	13.725.718	14.834.119	14.706.782	15.530.302	14.699.230	13,57
5	Kab. Berau	2.784.297	2.943.037	3.223.210	3.415.984	3.091.632	2,86
6	Kab.Malinau	485.133	515.764	557.196	609.230	541.831	0,50
7	Kab.Bulungan	887.735	939.983	992.970	1.039.197	964.971	0,89
8	Kab.Nunukan	1.201.770	1.247.029	1.301.905	1.353.082	1.275.947	1,18
9	Kab.Penajam Paser Utara	1.639.973	1.702.082	1.787.049	1.849.722	1.744.707	1,61
10	Kab.Tana Tidung	*	156.766	167.377	174.652	166.265	0,15
11	Kota Balikpapan	13.204.718	13.479.345	15.147.326	15.405.236	14.309.156	13,21
12	Kota Samarinda	9.803.725	10.108.378	10.595.535	11.071.771	10.394.852	9,60
13	Kota Tarakan	2.051.725	2.193.658	2.343.529	2.452.105	2.260.254	2,09
14	Kota Bontang	25.398.233	24.390.400	24.517.710	23.776.029	24.520.593	22,64
Provinsi		96.612.842	98.386.382	103.206.871	105.368.811	108.286.165	100,00

Sumber : BPS, PDRB Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha Tahun 2007-2010

*= Data Kabupaten Tana Tidung masih tergabung dengan Kabupaten Bulungan

Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur bertumpu pada empat kabupaten/kota. Hal ini dikarenakan pada empat kabupaten/kota tersebut memiliki kontribusi PDRB yang lebih tinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Selama tahun 2001-2009 (lihat Tabel 1.6) terlihat bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara

sebagai daerah penyumbang PDRB terbesar terhadap perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur, dengan rata-rata 27.231.970 juta rupiah (25,15 persen), kemudian Kota Bontang di peringkat kedua dengan rata-rata sebesar 24.520.593 juta rupiah (22,64 persen) dan diikuti oleh Kabupaten Kutai Timur dengan rata-rata PDRB sebesar 14.699.230 juta rupiah (13,57 persen) serta yang terakhir adalah Kota Balikpapan dengan rata-rata sebesar 14.309.156 juta rupiah (13,21 persen). Sementara kabupaten/kota yang lain memiliki PDRB di bawah empat daerah tersebut. Untuk daerah yang memiliki PDRB paling kecil yaitu Kabupaten Tana Tidung yaitu rata-rata sebesar 166.265 juta rupiah (0,15 persen).

Pada Tabel 1.6 terlihat adanya pemekaran wilayah di Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2007 terbentuk kabupaten termuda di Kalimantan Timur yaitu Kabupaten Tana Tidung. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bulungan.

Selama tahun 2006-2009 laju pertumbuhan ekonomi yang terjadi di masing-masing kabupaten/kota mengalami fluktuasi setiap tahunnya (lihat Tabel 1.7). Terdapat lima kabupaten/kota yang mengalami pertumbuhan meningkat di tahun 2008-2009. Lima kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Pasir yang pertumbuhannya meningkat dari 7,10 persen menjadi 7,74 persen, kemudian Kabupaten Kutai Barat dari 6,83 persen meningkat menjadi 6,89 persen, Kabupaten Kutai Timur dimana tahun 2008 pertumbuhannya -0,86 persen meningkat menjadi 5,60 persen, dan Kabupaten Malinau dari 8,03 di tahun 2008 menjadi 8,96 persen di tahun 2009.

Tabel 1.7
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2006-2009
(Persen)

No	Kabupaten/Kota	2006	2007	2008	2009
1	Kab.Pasir	11,94	12,92	7,10	7,74
2	Kab.Kutai Barat	6,11	6,45	6,83	6,89
3	Kab.Kutai Kartanegara	-2,53	-4,02	4,67	2,08
4	Kab.Kutai Timur	22,39	8,08	-0,86	5,60
5	Kab. Berau	5,08	5,70	9,52	5,98
6	Kab.Malinau	3,07	6,31	8,03	9,34
7	Kab.Bulungan	1,83	5,89	5,64	4,66
8	Kab.Nunukan	1,30	3,77	4,40	3,93
9	Kab.Penajam Paser Utara	1,63	3,79	4,99	3,51
10	Kab. Tana Tidung	*	*	6,77	4,35
11	Kota Balikpapan	4,62	2,08	12,37	1,70
12	Kota Samarinda	5,50	3,11	4,82	4,49
13	Kota Tarakan	7,51	6,92	6,83	4,63
14	Kota Bontang	-2,94	-3,97	0,52	-3,03
Provinsi		2,85	1,84	4,90	2,09

Sumber : PDRB Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2007-2010

*) = Data Kabupaten Tana Tidung masih tergabung dengan Kabupaten Bulungan

Sedangkan kabupaten/kota yang lain mengalami pertumbuhan menurun bahkan negatif seperti yang dialami oleh Kota Bontang, yaitu pada tahun 2008 sebesar 0,52 persen dan menurun di tahun 2009 menjadi minus 3,03 persen. Selain itu jika dibandingkan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi, terdapat dua daerah yang pertumbuhannya di bawah provinsi, kedua daerah tersebut adalah Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 2,08 persen dan Kota Bontang sebesar minus 3,03.

Salah satu indikator dalam mengukur tingkat kesejahteraan penduduk di suatu daerah yaitu dengan menggunakan PDRB per kapita (Todaro,2006). PDRB per kapita yang semakin besar menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat

semakin baik, dan bila PDRB per kapita semakin kecil maka bisa diartikan semakin buruk kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Selain dilihat dari tinggi rendahnya pendapatan tersebut, apakah PDRB per kapita tersebut sudah terdistribusi secara merata atau tidak. PDRB per kapita merupakan total PDRB masing-masing kabupaten/kota dibagi dengan jumlah penduduk di masing-masing kabupaten/kota di Kalimantan Timur.

Tabel 1.8
PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2006-2009
(Rupiah)

No	Kabupaten	Tahun				Rata-rata	
		2006	2007	2008	2009	Rupiah	Persen
1	Kab.Pasir	18.569.665	20.215.385	20.876.916	21.692.317	18.247.876	54,90
2	Kab.Kutai Barat	16.425.556	17.159.810	17.994.398	18.882.536	15.595.669	46,92
3	Kab.Kutai Kartanegara	50.447.655	46.628.263	47.008.612	46.224.491	54.242.613	163,18
4	Kab.Kutai Timur	66.623.877	68.126.419	63.915.577	63.882.577	62.963.263	189,41
5	Kab. Berau	18.272.306	18.529.246	19.471.945	19.804.989	18.135.757	54,56
6	Kab.Malinau	9.539.337	9.615.819	9.851.594	10.217.000	9.312.860	28,02
7	Kab.Bulungan	10.050.394	10.205.436	10.872.448	10.989.682	9.530.660	28,67
8	Kab.Nunukan	10.645.406	10.436.961	10.297.034	10.115.137	9.755.753	29,35
9	Kab.Penajam Paser Utara	12.684.947	12.829.248	13.128.001	13.246.267	13.546.227	40,75
10	Kab. Tana Tidung	*	13.141.579	12.909.878	12.396.326	12.815.928	38,55
11	Kota Balikpapan	26.656.703	26.394.482	28.775.589	28.397.480	27.642.348	83,16
12	Kota Samarinda	15.305.860	15.272.683	15.495.352	15.675.379	15.522.176	46,70
13	Kota Tarakan	12.886.992	13.107.891	13.324.289	13.267.820	11.707.434	35,22
14	Kota Bontang	203.452.796	188.440.349	182.943.677	170.969.392	214.999.879	646,79
Provinsi		31.430.575	30.841.101	31.175.859	30.674.331	33.241.248	100,00

Sumber : PDRB Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha Tahun 2007-2010

* = Data Kabupaten Tana Tidung masih tergabung dengan Kabupaten Bulungan

Berdasarkan Tabel 1.8, selama tahun 2006-2009, terdapat tiga kabupaten/kota yang memiliki PDRB per kapita di atas rata-rata PDRB per kapita

provinsi sebesar Rp 33.241.248. Tiga kabupaten/kota tersebut adalah Kota Bontang dengan rata-rata PDRB per kapita sebesar Rp 214.999.879 (646,79 persen) atau enam kali lipat lebih besar dari provinsi. Kemudian Kabupaten Kutai Timur dengan rata-rata PDRB per kapita sebesar Rp 62.963.263 (189,41 persen) atau hampir dua kali lipat lebih besar dari PDRB per kapita provinsi, dan urutan ketiga yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan rata-rata sebesar Rp 54.242.613 (163,18 persen) atau mendekati dua kali lebih besar dari PDRB per kapita provinsi. Sedangkan sebelas kabupaten/kota lainnya memiliki PDRB per kapita di bawah provinsi.

Tabel 1.9
Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2006-2009
(Jiwa)

No	Kabupaten/Kota	Tahun				Rata-rata	
		2006	2007	2008	2009	Jiwa	Persen
1	Kab.Pasir	179.150	180.986	182.745	184.402	181.821	5,94
2	Kab.Kutai Barat	155.787	157.847	159.852	161.778	158.816	5,19
3	Kab.Kutai Kartanegara	508.664	518.722	528.702	538.529	523.654	17,11
4	Kab.Kutai Timur	181.759	186.726	191.728	196.738	189.238	6,18
5	Kab. Berau	156.991	163.309	169.793	176.422	166.629	5,45
6	Kab.Malinau	53.148	56.107	59.200	62.423	57.720	1,89
7	Kab.Bulungan	107.270	110.978	114.756	118.587	112.898	3,69
8	Kab.Nunukan	118.312	125.421	132.886	140.707	129.332	4,23
9	Kab.Penajam Paser Utara	123.807	125.106	126.354	127.532	125.700	4,11
10	Kab. Tana Tidung	*	11.929	12.965	14.089	12.994	0,43
11	Kota Balikpapan	487.353	497.168	506.915	516.522	501.990	16,41
12	Kota Samarinda	590.519	597.075	603.389	609.380	600.091	19,61
13	Kota Tarakan	166.588	175.291	184.353	193.759	179.998	5,88
14	Kota Bontang	126.152	130.064	134.027	138.021	132.066	4,32
Provinsi		2.955.500	3.024.800	3.094.700	3.164.800	3.059.950	100

Sumber : Kalimantan Timur Dalam Angka Tahun 2007-2010

*) = Data Kabupaten Tana Tidung masih tergabung dengan Kabupaten Bulungan

Tinggi dan rendahnya PDRB per kapita di masing-masing daerah dipengaruhi oleh tinggi dan rendahnya nilai PDRB, selain itu juga dipengaruhi oleh jumlah penduduk dalam daerah tersebut (lihat Tabel 1.9). Dimana jumlah penduduk paling banyak dari tahun 2006-2009 bermukim di Kota Samarinda dengan rata-rata sebesar 600.091 jiwa (19,61 persen), kemudian Kabupaten Kutai Kartanegara rata-rata berjumlah 523.654 jiwa (17,11 persen), dan Kota Balikpapan berjumlah 501.990 jiwa (16,41 persen), sedangkan daerah yang paling sedikit jumlah penduduknya yaitu Kabupaten Tana Tidung sebesar 12.994 (0,43 persen).

Perbedaan tinggi rendahnya PDRB per kapita yang dimiliki tiap kabupaten/kota menyebabkan terjadinya ketidakmerataan. Hal ini diindikasikan dapat menyebabkan ketimpangan antar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur.

Ketimpangan pembangunan antar daerah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Terdapat beberapa peneliti diantaranya Esmara (1975), Sediono dan Igusa (1992), Azis (1989), Hill dan Williams (1989), Sondakh (1994), Ibrahim (1974), Uppal dan Handoko (1988), Aktia dan Lukman (1994) dan Sjafrizal (1997,2000) (dalam Tulus Tambunan , 2001) yang telah melakukan penelitian mengenai ketimpangan ekonomi regional di Indonesia dan faktor-faktor penyebabnya. Terdapat beberapa faktor-faktor utama penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi antar daerah yaitu sebagai berikut :

1. Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah

2. Alokasi investasi
3. Tingkat mobilitas faktor produksi antar daerah
4. Perbedaan sumber daya alam antar daerah
5. Perbedaan kondisi demografis antar daerah
6. Kurang lancarnya perdagangan antar daerah

Menurut Hipotesa Neo-Klasik pada permulaan proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung meningkat. Proses tersebut akan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Kemudian pada saat proses pembangunan tersebut terus berlanjut, maka secara berangsur-angsur ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut akan menurun (Sjafrizal, 2008). Simon Kuznets (dalam Todaro, 2006), mengatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk, dalam arti pertumbuhan yang tinggi mengakibatkan ketimpangan yang tinggi, dan pada tahap pertumbuhan ekonomi selanjutnya di mana perekonomian semakin mengalami pertumbuhan dibarengi dengan distribusi pendapatan yang semakin membaik, yang dikenal dengan kurva “U-terbalik”.

Forbes Kristin (2000) dalam penelitiannya yang berjudul “*Reassessment of the Relationship Between Inequality and Growth*” dan Robert Barro pada penelitiannya yang berjudul “*Inequality, Growth and Investment*” dengan menggunakan metode analisis data panel menemukan hasil bahwa kesenjangan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan. Semakin tinggi kesenjangan maka pertumbuhan ekonomi semakin tinggi dan sebaliknya. Sedangkan Person dan Tabellini (1994) dalam penelitiannya yang berjudul “*Is Inequality Harmful for*

Economic Growth?” menemukan bahwa kesenjangan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu semakin tinggi kesenjangan maka pertumbuhan ekonomi semakin rendah, dan sebaliknya jika kesenjangan semakin rendah, maka pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi.

Ketimpangan daerah dapat diukur dengan Indeks Williamson. Williamson (1965) meneliti hubungan antara disparitas regional dengan tingkat pembangunan ekonomi, yang menemukan bahwa selama tahap awal pembangunan, disparitas regional menjadi lebih besar dan pembangunan terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu (Sutarno, 2003).

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya dalam penelitian ini dimana melalui data-data yang telah dipaparkan, menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang dialami oleh masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur berbeda, terdapat kabupaten/kota yang mengalami pertumbuhan yang positif namun ada juga yang mengalami pertumbuhan negatif. Selain itu besar nilai PDRB per kapita setiap daerah yang memperlihatkan perbedaan yang cukup mencolok antara daerah yang satu dengan yang lainnya, menunjukkan bahwa distribusi pendapatan antar daerah yang belum merata.

Ketimpangan daerah yang dibiarkan secara terus menerus tersebut akan membawa pengaruh yang merugikan (*backwash effect*) yang mendominasi pengaruh yang menguntungkan (*spread effect*) seperti dapat mengakibatkan adanya kecemburuan sosial antar daerah dan mengganggu kestabilan perekonomian.

Maka dari itu hal tersebut yang melatarbelakangi perlu untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan dan tingkat ketimpangan yang terjadi antar kabupaten/kota di Kalimantan Timur. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengambil judul **“ANALISIS PERTUMBUHAN DAN KETIMPANGAN ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2001-2009”**.

I.2 Rumusan Masalah

Ketidakmerataan pertumbuhan dan distribusi pendapatan perkapita merupakan permasalahan klasik dalam pembangunan ekonomi suatu daerah. Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi terkaya di Indonesia, karena memiliki potensi kekayaan sumber daya alam seperti migas dan batu bara yang mendominasi pembentukan PDRB Provinsi. Kontribusi PDRB yang tinggi diberikan oleh Provinsi Kalimantan Timur terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, namun “kue pembangunan daerah” yang dihasilkan tersebut belum diterima secara merata oleh seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur. Laju pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah, dimana terdapat daerah yang mengalami pertumbuhan positif bahkan ada juga yang negatif. Selain itu besar PDRB per kapita antar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur dimana terdapat perbedaan yang cukup mencolok antara daerah satu dengan yang lain. Hal ini memperlihatkan bahwa pembangunan antar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur belum terlaksana secara merata.

Pertanyaan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana klasifikasi masing-masing daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur periode tahun 2001-2009 berdasarkan Tipologi Klassen?
2. Berapa besar ketimpangan pendapatan daerah antar kabupaten/kota di Kalimantan Timur pada periode tahun 2001-2009 ?

I.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengklasifikasi kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur periode tahun 2001-2009 berdasarkan Tipologi Klassen.
2. Untuk mengetahui besar ketimpangan pendapatan daerah antar kabupaten/kota yang terjadi di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur pada periode tahun 2001-2009.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Sebagai bahan informasi dan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya dalam aspek yang sama maupun aspek yang terkait.

1.4 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika bab yang terdiri dari Bab I Pendahuluan, Bab II Telaah Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil dan Analisis, serta Bab V Penutup.

BAB I merupakan pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah yang merupakan landasan pemikiran secara garis besar, baik secara teoritis dan fakta serta pengamatan yang menggambarkan permasalahan penelitian. Rumusan masalah merupakan pernyataan tentang keadaan, fenomena dan konsep yang memerlukan jawaban melalui suatu penelitian. Tujuan penelitian mengungkapkan hasil yang ingin dicapai melalui proses penelitian dan kegunaan penelitian bagi khasanah ilmu pengetahuan. Sistematika penulisan mencakup uraian ringkasan dari materi yang dibahas pada setiap bab yang ada pada skripsi.

BAB II merupakan telaah pustaka, berisi tentang landasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian yaitu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi daerah, teori pertumbuhan ekonomi, teori basis ekonomi, Hipotesis Kuznets, Tipologi Klassen dan ketimpangan distribusi antar wilayah. Di samping itu pada bab ini juga terdapat penelitian terdahulu serta kerangka pemikiran.

BAB III merupakan metode penelitian, berisi tentang definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data yang digunakan untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang ada.

BAB IV merupakan hasil dan pembahasan, berisi tentang deskripsi objek penelitian, analisis data yang menjelaskan estimasi serta pembahasan yang menerangkan interpretasi dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V merupakan penutup, berisi simpulan hasil analisis data pembahasan, dalam bagian ini juga berisi keterbatasan dan saran-saran yang direkomendasikan kepada pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Terdapat tiga unsur penting di dalamnya yaitu (1) pembangunan ekonomi sebagai suatu proses berarti perubahan yang terus-menerus yang di dalamnya telah mengandung unsur-unsur kekuatan sendiri untuk investasi baru; (2) usaha meningkatkan pendapatan per kapita; (3) kenaikan pendapatan per kapita harus berlangsung dalam jangka panjang. Namun pendapatan per kapita tidak cukup untuk menjadi fokus strategi pembangunan semata, bahkan menimbulkan adanya ketimpangan, kemiskinan, pengangguran dan ketidakmerataan dalam distribusi yang banyak dialami oleh negara-negara yang mengalami kenaikan pendapatan per kapita (Suryana, 2000). Oleh karena itu definisi pembangunan ekonomi menurut Todaro (2006) pembangunan ekonomi diartikan sebagai proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap-sikap mental yang sudah terbiasa, dan lembaga-lembaga nasional termasuk pula percepatan/akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan dan pemberantasan kemiskinan yang absolut.

Pembangunan dalam arti luas mencakup aspek kehidupan baik ideologi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan lain sebagainya. Beberapa

ekonomi membedakan pengertian pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi, sebagai berikut:

1. Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat yaitu tingkat pertambahan GDP/GNP pada satu tahun tertentu adalah melebihi tingkat pertambahan penduduk.
2. Perkembangan GDP/GNP yang terjadi dalam satu negara dibarengi oleh perombakan dan modernisasi struktur ekonominya.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP/GNP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah terjadi atau tidak perubahan struktur ekonomi. Jadi, pada umumnya pembangunan selalu dibarengi dengan pertumbuhan, tetapi pertumbuhan belum tentu dibarengi dengan pembangunan (Suryana, 2000).

2.1.2 Pembangunan Ekonomi Daerah

Arsyad (2002) mengartikan pembangunan ekonomi daerah sebagai suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengoptimalkan sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan ekonomi dengan wilayah tersebut.

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses, yaitu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk

dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru (Arsyad, 2002).

Perencanaan pembangunan ekonomi daerah bisa dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumber-sumber daya publik yang tersedia di daerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumberdaya-sumberdaya swasta secara bertanggung jawab. Dalam pembangunan ekonomi daerah diperlukan campur tangan pemerintah. Apabila pembangunan daerah diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar maka pembangunan dan hasilnya tidak dapat dirasakan oleh seluruh daerah secara merata (Arsyad, 2002).

Menurut Arsyad (2002) keadaan sosial ekonomi yang berbeda di setiap daerah akan membawa implikasi bahwa cakupan campur tangan pemerintah untuk tiap daerah berbeda pula. Perbedaan tingkat pembangunan antar daerah, mengakibatkan perbedaan tingkat kesejahteraan daerah. Memusatnya ekspansi ekonomi di suatu daerah disebabkan berbagai hal, misalnya kondisi dan situasi alamiah yang ada, letak geografis, dan sebagainya.

2.1.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Perbedaan pokok antara pertumbuhan perekonomian nasional dan pertumbuhan daerah adalah perpindahan faktor. Asumsi bahwa perekonomian suatu bangsa sebagai perekonomian tertutup yang acap kali digunakan dalam analisis pertumbuhan daerah. Terdapat dua pendekatan metodologis yang sangat berbeda, berkaitan dengan analisis pertumbuhan regional, mengadaptasi model-

model ekonomi makro yang digunakan dalam teori pertumbuhan agregatif atau menafsirkan pertumbuhan suatu daerah menurut dinamikanya struktur industri.

Pendekatan pertama memungkinkan suatu daerah mengidentifikasi hubungan terpenting antara perpindahan faktor-faktor dan pertumbuhan regional dengan cara yang lebih jelas. Sementara pendekatan kedua lebih berorientasi pada perubahan pola pertumbuhan regional sebagai efek neto dari keputusan-keputusan lokasi dan output yang diambil oleh perubahan-perubahan bisnis sebagai reaksi terhadap perubahan-perubahan kebutuhan input dan pasar dalam industri-industri tersebut dan arus faktor adalah variabel-variabel yang relevan dalam keputusan seperti itu (Richardson, 2001).

Teori pertumbuhan ekonomi daerah mengutip dari ekonomi makro yang berlaku untuk ekonomi nasional yang dengan sendirinya juga berlaku untuk daerah dan teori yang dikembangkan asli dalam ekonomi regional. Teori-teori tersebut antara lain teori ekonomi klasik, teori Harrod-Domar, teori Solow Swan, sedangkan teori yang langsung terkait dengan ekonomi regional adalah teori basis-ekspor dan model interregional (Tarigan, 2005).

2.1.3.1 Teori Ekonomi Klasik

Teori ekonomi klasik menciptakan sistem ekonomi pasar bebas yang akan menciptakan efisiensi, membawa ekonomi kepada kondisi *full employment* dan menjamin pertumbuhan ekonomi sampai tercapai posisi stasioner. Pemerintah tidak perlu terlalu mencampuri urusan perekonomian, hal yang perlu dilakukan pemerintah daerah adalah memberi kebebasan kepada setiap orang/badan untuk

berusaha, tidak membuat peraturan yang menghambat pergerakan orang dan barang, menjaga keamanan dan ketertiban sehingga relatif aman untuk berusaha, menyediakan berbagai fasilitas sarana dan prasarana sehingga pengusaha dapat beroperasi dengan efisien, dengan demikian pertumbuhan ekonomi daerah akan tercapai.

2.1.3.2 Teori Harrod-Domar dalam Sistem Regional

Teori Harrod-Domar berdasarkan pada asumsi antara lain perekonomian bersifat tertutup, hasrat menabung adalah konstan, proses produksi memiliki koefisien yang tetap, tingkat pertumbuhan angkatan kerja adalah konstan dan sama dengan tingkat pertumbuhan. Atas dasar asumsi-asumsi tersebut, Harrod-Domar membuat analisis dan menyimpulkan bahwa pertumbuhan jangka panjang yang mantap hanya bisa tercapai apabila terpenuhi syarat-syarat keseimbangan sebagai berikut :

$$g = k = n \quad (2.1)$$

dimana : $g = Growth$ (tingkat pertumbuhan output)

$k = Capital$ (Tingkat pertumbuhan modal)

$n = Tingkat$ pertumbuhan angkatan kerja

Agar terdapat keseimbangan maka antara tabungan (S) dan investasi (I) harus terdapat kaitan yang saling menyeimbangkan. Padahal peran k untuk menghasilkan tambahan produksi ditentukan oleh v (*capital output ratio*). Apabila tabungan dan investasi adalah sama ($S=I$), maka:

$$\frac{I}{K} = \frac{S}{K} = \frac{S}{Y} = \frac{Y}{K} = \frac{S/Y}{K/Y} = \frac{S}{V} \quad (2.2)$$

agar pertumbuhan tersebut mantap, harus dipenuhi syarat $g = n = s/v$. Untuk perekonomian daerah, Harry W. Richardson (dikutip oleh Tarigan, 2005:50) menyatakan syarat bagi perekonomian daerah yang bersifat terbuka yaitu

$$S + M = I + X, \text{ dimana } X = \text{ekspor dan } M = \text{impor} \quad (2.3)$$

$$(s + m)Y = I + X \quad (2.4)$$

$$\frac{I}{Y} = s + m - \frac{X}{Y} \quad (2.5)$$

$$X = \sum_{j=1}^n M_{ij} = \sum_{j=1}^n m_j Y_j \quad (2.6)$$

$$\frac{I}{Y} = \frac{S}{Y} \frac{s.v}{v} \text{ dimana } g = \frac{s}{v} \quad (2.7)$$

Dengan demikian, Richardson (dikutip oleh Tarigan, 2005:51) merumuskan persamaan pertumbuhan suatu wilayah adalah:

$$g_i = \frac{S_i + m_i - \sum_{j=1}^n m_{ji} Y_j / Y_i}{v_i} \quad (2.8)$$

Pertumbuhan yang mantap tergantung pada apakah arus modal dan tenaga kerja dapat bergerak searah secara seimbang, akan tetapi dapat juga pincang diakibatkan daerah yang pertumbuhannya tinggi akan menarik modal dan tenaga kerja dari daerah lain yang pertumbuhannya rendah sehingga yang maju semakin maju dan yang terbelakang semakin ketinggalan.

2.1.3.3 Teori Pertumbuhan Neoklasik

Teori Solow-Swan, adanya pertumbuhan yang mantap yang disebabkan kemungkinan substitusi antara modal (K) dan tenaga kerja (L), serta dimasukkannya unsur kemajuan teknologi (T). Oleh sebab itu, fungsi produksinya berbentuk:

$$Y_i = f_i(K, L, t) \quad (2.9)$$

Dalam kerangka ekonomi wilayah, Richardson (dikutip oleh Tarigan, 2005:53) kemudian menderivasikan rumus di atas menjadi sebagai berikut:

$$Y_i = a_i k_i + (1 - a_i) n_i + T \quad (2.10)$$

Dimana Y_i = besarnya output

k_i = tingkat Pertumbuhan Modal

T_i = kemajuan Teknologi

n_i = tingkat Pertumbuhan tenaga kerja

a = Bagian yang dihasilkan oleh faktor modal

$(1-a)$ = Bagian yang dihasilkan oleh faktor di luar modal

Pertumbuhan mantap membutuhkan syarat:

$$MPK_i = a_i \frac{Y_i}{K_i} = p \quad (2.11)$$

Suatu daerah akan mengimpor modal jika tingkat pertumbuhan modalnya lebih kecil dari rasio tabungan domestik terhadap modal. Dalam pasar persaingan sempurna *marginal productivity of labour* (MPL) adalah fungsi lapangan tapi bersifat terbalik dari *marginal productivity of capital* (MPK). Hal ini bisa dilihat dari nilai rasio modal tenaga kerja (K/L). Modal akan mengalir dari daerah yang upahnya tinggi ke daerah yang upahnya rendah karena akan memberikan balas jasa yang lebih tinggi. Sebaliknya tenaga kerja akan mengalir dari daerah upah rendah ke daerah upah tinggi. Mekanisme tersebut pada akhirnya akan menciptakan balas jasa faktor-faktor produksi di semua daerah sama. Dengan demikian, perekonomian regional atau pendapatan per kapita regional mengalami proses konvergensi.

2.1.4 Teori Basis Ekonomi

Terdapat dua aktivitas dalam perekonomian regional yang digolongkan dalam dua sektor yaitu sektor basis dan non basis. Teori tersebut menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumber daya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja (Arsyad, 2002). Aktivitas basis memiliki peranan penggerak utama dalam pertumbuhan suatu wilayah. Semakin besar ekspor suatu wilayah semakin maju pertumbuhan wilayah. Setiap perubahan yang terjadi pada sektor basis menimbulkan efek ganda dalam perekonomian regional. Kegiatan non basis adalah kegiatan yang menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat yang berada di dalam kasus wilayah perekonomian yang bersangkutan.

2.1.5 Tipologi Klassen

Tipologi Klassen merupakan alat analisis yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi sektor, subsektor, usaha, atau komoditi prioritas atau unggulan suatu daerah. Alat analisis ini dapat digunakan melalui dua pendekatan, yang pertama adalah dengan pendekatan sektoral sedangkan pendekatan yang kedua adalah dengan pendekatan wilayah/daerah seperti yang untuk mengetahui klasifikasi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pendapatan atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita daerah. Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan

rata-rata PDRB per kapita sebagai sumbu horizontal. Pendekatan wilayah menghasilkan empat klasifikasi kabupaten/kota yang masing-masing mempunyai karakteristik pertumbuhan ekonomi yang berbeda yaitu:

1. Daerah maju dan cepat tumbuh (*Rapid Growth Region*/Kuadran I)

Daerah maju dan cepat tumbuh (*Rapid Growth Region*) adalah daerah yang mengalami laju pertumbuhan PDRB dan tingkat pendapatan per kapita yang lebih tinggi dari rata-rata seluruh daerah. Pada dasarnya daerah-daerah tersebut merupakan daerah yang paling maju, baik dari segi tingkat pembangunan maupun kecepatan pertumbuhan. Biasanya daerah-daerah ini merupakan daerah yang mempunyai potensi pembangunan yang sangat besar dan telah dimanfaatkan secara baik untuk kemakmuran masyarakat setempat.

2. Daerah berkembang cepat (*Growing Region* / Kuadran II)

Daerah berkembang cepat (*Growing Region*) pada dasarnya adalah daerah yang memiliki potensi pengembangan sangat besar, tetapi masih belum diolah secara baik. Oleh karena itu, walaupun tingkat pertumbuhannya ekonominya tinggi namun tingkat pendapatan per kapitanya, yang mencerminkan tahap pembangunan yang telah dicapai sebenarnya masih relatif rendah dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Karena di masa mendatang daerah ini diperkirakan akan mampu berkembang pesat untuk mengejar ketertinggalannya dengan daerah maju.

3. Daerah relatif tertinggal (*Relatively Backward Region* / Kuadran III).

Kemudian daerah relatif tertinggal (*Relatively Backward Region*) adalah daerah yang mempunyai tingkat pertumbuhan dan pendapatan per kapita yang

berada di bawah rata-rata dari seluruh daerah. Ini berarti bahwa baik tingkat kemakmuran masyarakat maupun tingkat pertumbuhan ekonomi di daerah ini masih relatif rendah. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa di daerah ini tidak akan berkembang di masa mendatang. Melalui pengembangan sarana dan prasarana perekonomian daerah berikut tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat setempat diperkirakan daerah ini secara bertahap akan dapat pula mengejar ketertinggalannya (Sjafrizal,1997).

4. Daerah maju tapi tertekan (*Retarded region*/Kuadran IV)

Daerah maju tapi tertekan (*Retarded Region*) adalah daerah-daerah yang relatif maju tetapi dalam beberapa tahun terakhir laju pertumbuhannya menurun akibat tertekannya kegiatan utama daerah yang bersangkutan. Karena itu, walaupun daerah ini merupakan daerah telah maju tetapi di masa mendatang diperkirakan pertumbuhannya tidak akan begitu cepat , walaupun potensi pembangunan yang dimiliki pada dasarnya sangat besar.

2.1.6 Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar Daerah

Dengan adanya pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap masalah ketimpangan regional. Ketimpangan dalam pembagian pendapatan adalah ketimpangan dalam perkembangan ekonomi antara berbagai daerah pada suatu wilayah yang akan menyebabkan pula ketimpangan tingkat pendapatan perkapita antar daerah (Mudrajad Kuncoro, 2004).

Berbagai penelitian tentang ketimpangan antar daerah telah banyak dilakukan Kuznets (1954) tercatat sebagai salah satu peneliti awal dalam meneliti kesenjangan. Ia meneliti kesenjangan di berbagai negara secara *cross-sectional* dan menemukan pola U terbalik. Kuznets menyimpulkan bahwa pendapatan rata-rata perkapita pada awal perkembangan negara masih rendah, dan tingkat kesenjangan juga rendah. Ketika pendapatan rata-rata naik, maka kesenjangan juga meningkat. Kemudian ketika pendapatan rata-rata naik lebih tinggi, maka kesenjangan akan turun kembali. (dalam Todaro,2004)

Myrdal (1957) melakukan penelitian tentang sistem kapitalis yang menekankan kepada tingkat keuntungan bagi suatu wilayah yang memberikan harapan tingkat keuntungan tinggi akan berkembang menjadi pusat-pusat perkembangan kesejahteraan. Perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antar daerah yang berlebihan akan menyebabkan pengaruh yang merugikan (*backwash effects*) mendominasi pengaruh yang menguntungkan (*spread effects*) terhadap pertumbuhan daerah, dalam hal ini mengakibatkan proses ketidakseimbangan. Pelaku –pelaku yang mempunyai kekuatan di pasar secara normal akan cenderung meningkat bukannya menurun, sehingga mengakibatkan ketimpangan antar daerah (dalam Arsyad, 2002).

Irma Adelman dan Cynthia Taft Morris tahun 1973 (dalam Arsyad, 2002) menyatakan bahwa faktor penyebab ketimpangan pendapatan di negara sedang berkembang adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan turunnya pendapatan perkapita.

2. Inflasi, dimana penerimaan pendapatan uang yang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan penambahan produksi barang-barang
3. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah
4. Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal (*capital intensive*), sehingga persentase pendapatan modal dari tambahan harta lebih besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja sehingga pengangguran bertambah dan rendahnya mobilitas sosial.
5. Pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang menyebabkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi golongan kapitalis.
6. Memburuknya nilai tukar bagi mata uang negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara maju sebagai akibat ketidakelastisan barang-barang ekspor dari negara sedang berkembang.
7. Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga dan lain-lain.

Tambunan (2001) mengemukakan beberapa faktor yang menyebabkan ketimpangan wilayah antara lain:

1. Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah. Semakin tinggi konsentrasi kegiatan ekonomi di wilayah tertentu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan ketimpangan pembangunan antar daerah.
2. Alokasi investasi berdasarkan teori Harrod-Domar yang menerangkan adanya korelasi positif antara tingkat investasi di suatu wilayah yang akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan masyarakat

perkapita di wilayah tersebut rendah, karena tidak ada kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif.

3. Tingkat mobilitas dan faktor-faktor produksi yang rendah antar daerah. Kurang lancarnya mobilitas faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal bisa menyebabkan terjadinya ketimpangan ekonomi regional.
4. Perbedaan sumberdaya alam antar daerah. Dasar pemikiran klasik mengatakan bahwa pembangunan ekonomi di daerah yang kaya sumberdaya alamnya akan lebih cepat maju dibandingkan dengan daerah yang miskin sumberdaya alam.
5. Perbedaan kondisi demografis antar wilayah. Ketimpangan ekonomi regional juga disebabkan oleh perbedaan kondisi demografis, terutama dalam hal jumlah dan pertumbuhan penduduk, tingkat kepadatan pendidikan, kesehatan, disiplin masyarakat dan etos kerja. Faktor-faktor ini mempengaruhi tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi lewat sisi permintaan dan penawaran.
6. Kurang lancarnya perdagangan. Kurang lancarnya perdagangan antar daerah juga merupakan unsur-unsur yang turut menciptakan terjadinya ketimpangan ekonomi regional. Ketidاكلancaran tersebut lebih disebabkan oleh keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi.

Menurut Sjafrizal (2008), faktor-faktor penyebab ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah:

1. Perbedaan kandungan sumber daya alam
2. Perbedaan kondisi demografis
3. Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa

4. Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah
5. Alokasi dana pembangunan antar wilayah

Ketimpangan pembangunan yang terjadi antar wilayah di suatu daerah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi di daerah tersebut. Menurut Sjafrizal (2008), ketimpangan yang terjadi antar wilayah disebabkan oleh perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah, sehingga kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan menjadi berbeda. Perbedaan kekayaan daerah ini yang pada akhirnya menimbulkan adanya wilayah maju (*developed region*) dan wilayah terbelakang (*underdeveloped region*).

Menurut Mudrajat Kuncoro (2004), kesenjangan mengacu pada standar hidup relatif dari seluruh masyarakat. Penyebab kesenjangan antar wilayah yaitu adanya perbedaan faktor anugerah awal. Perbedaan inilah yang menyebabkan tingkat pembangunan di berbagai wilayah dan daerah berbeda-beda sehingga menimbulkan gap atau jurang kesejahteraan di berbagai wilayah tersebut (Sadono Sukirno, 1985).

Ketimpangan pada kenyataannya tidak dapat dihilangkan dalam kegiatan pembangunan daerah. Adanya ketimpangan, akan memberikan dorongan kepada daerah yang terbelakang untuk dapat berusaha meningkatkan kualitas hidupnya agar tidak jauh tertinggal dengan daerah sekitarnya. Selain itu daerah-daerah tersebut akan bersaing guna meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga ketimpangan dalam hal ini memberikan dampak positif. Akan tetapi ada pula dampak negatif yang ditimbulkan dengan semakin tingginya ketimpangan antar

wilayah. Dampak negatif tersebut berupa inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi pada umumnya dipandang tidak adil (Todaro, 2006).

Penelitian yang dilakukan oleh Williamson (1966) menekankan pada kesenjangan antarwilayah di dalam negara. Williamson menghubungkan kesenjangan pendapatan rata-rata antar wilayah dengan berbagai faktor termasuk tingkat urbanisasi suatu wilayah. Dalam penelitian ini untuk menghitung disparitas pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur digunakan indeks ketimpangan Williamson.

Perhitungan Indeks Williamson (IW) berkisar antara $0 < IW < 1$, di mana semakin mendekati nol artinya daerah tersebut semakin tidak timpang. Sedangkan bila mendekati satu maka semakin timpang daerah yang diteliti (Sjafrizal, 2008).

Selain dengan indeks Williamson, Ying dalam Mudrajad Kuncoro (2006) menggunakan indeks Theil untuk menghitung ketimpangan pendapatan antar wilayah. Indeks Theil tersebut dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu ketimpangan regional dalam wilayah dan ketimpangan regional antar daerah. Indeks Theil memungkinkan untuk membuat perbandingan selama kurun waktu tertentu. Indeks ini juga dapat menyediakan secara rinci dalam sub unit geografis yang lebih kecil, yang pertama akan digunakan untuk menganalisis kecenderungan konsentrasi geografis selama periode tertentu dan yang kedua juga penting ketika kita mengkaji gambaran yang lebih rinci mengenai kesenjangan/ketimpangan spasial. Indeks Entropi Theil (IET) berkisar antara $0 < IET < 1$, di mana semakin mendekati nol artinya wilayah tersebut semakin tidak timpang dan sebaliknya.

2.1.7 Hipotesis Kuznets

Simon Kuznets (1995) dalam Mudrajad Kuncoro (2006) membuat suatu hipotesis adanya kurva “U terbalik” (*inverted U curve*) bahwa mula-mula ketika pembangunan dimulai, distribusi pendapatan akan makin tidak merata, namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu, distribusi pendapatan makin merata. Menurut Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan), dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada (Todaro, 2006).

Profesor Kuznets mengemukakan enam karakteristik atau ciri-ciri proses pertumbuhan ekonomi yang bisa ditemui di hampir semua negara yang sekarang maju sebagai berikut:

1. Tingkat pertumbuhan output per kapita dan pertumbuhan penduduk yang tinggi.
2. Tingkat kenaikan produktivitas faktor total yang tinggi.
3. Tingkat transformasi struktural yang ekonomi yang tinggi.
4. Tingkat transformasi sosial dan ideologi yang tinggi.
5. Adanya kecenderungan negara-negara yang mulai atau sudah maju perekonomiannya untuk berusaha merambah bagian-bagian dunia lainnya sebagai daerah pemasaran dan sumber bahan baku yang baru.

6. Terbatasnya penyebaran pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai sepertiga bagian penduduk dunia.

Dua faktor yang pertama lazim disebut sebagai variabel-variabel ekonomi agregat. Sedangkan nomor tiga dan empat biasa disebut variabel-variabel transformasi struktural. Adapun dua faktor yang terakhir disebut sebagai variabel-variabel yang mempengaruhi penyebaran pertumbuhan ekonomi secara internasional (Todaro, 2004).

Sebelumnya Hipotesis Kuznets pernah dibuktikan oleh Sutarno dan Mudrajad Kuncoro pada Kabupaten Banyumas. Pada penelitiannya Sutarno dan Mudrajad Kuncoro (2003) menggunakan Indeks Williamson untuk mengukur ketimpangan dan melihat hubungannya terhadap pertumbuhan PDRB di Kabupaten Banyumas.

Hasil dari penelitian Sutarno dan Mudrajad Kuncoro (2003) menunjukkan kurva berbentuk U terbalik, di mana pada pertumbuhan awal ketimpangan memburuk dan pada tahap-tahap berikutnya ketimpangan menurun, namun pada suatu waktu akan terjadi peningkatan ketimpangan lagi dan akhirnya akan menurun lagi sehingga dapat dikatakan peristiwa tersebut seperti berulang kembali.

Pada akhirnya analisis Kuznets (Todaro, 2006) menyatakan bahwa pertumbuhan di negara-negara maju tidak menyebabkan negara-negara berkembang ikut tumbuh, hal ini dikarenakan negara berkembang tidak mampu mengikuti pertumbuhan negara-negara maju tersebut, sehingga terjadilah kesenjangan antarnegara maju dan negara berkembang dalam pertumbuhannya

ekonominya. Kritik utama terhadap kurva Kuznets adalah hasil ini sangat sensitif ukuran *inequality* dan pemilihan set data. Dengan melakukan pemilihan yang berbeda, seseorang bisa mendapat kurva U, kurva U terbalik atau tidak ada hubungan sama sekali.

2.2 Penelitian terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu mengenai pertumbuhan dan ketimpangan telah banyak dilakukan, antara lain:

1. Torsten Person dan Guido Tabellini (1994) dalam penelitiannya tentang *Is Inequality Harmful For Growth ?*, dengan menggunakan data sembilan negara yaitu Austria, Denmark, Finlandia, Jerman, Belanda, Norwegia, Swedia, Inggris dan Amerika Serikat. Hasil penelitian yaitu ditemukan bahwa ketimpangan pendapatan berbahaya terhadap pertumbuhan. Implikasi model diperkuat oleh bukti-bukti, kedua data panel dan sesudah perang menunjukkan signifikan dan hubungan negatif antara ketimpangan dan pertumbuhan.
2. Sjafrizal (1997) dalam penelitiannya yang berjudul *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat*. Alat analisis yang digunakan adalah Tipologi Klassen dan Indeks Williamson. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara relatif perkembangan pembangunan regional di wilayah Indonesia bagian barat dalam periode 1987-1995 lebih baik dibandingkan dengan keadaan rata-rata seluruh Indonesia. Berdasarkan analisis Tipologi Klassen, dari total 9 provinsi di wilayah Indonesia bagian barat, terdapat 3 provinsi yang termasuk daerah maju dan tumbuh cepat, 1

provinsi yang termasuk daerah berkembang cepat, 3 provinsi yang termasuk daerah maju tapi tertekan dan 2 provinsi yang termasuk daerah relatif tertinggal.

3. Kristin J. Forbes (2000) dengan penelitiannya yang berjudul *A Reassessment of The Relationship Between Inequality and Growth*, dengan menggunakan data panel, hasil menunjukkan bahwa dalam jangka pendek dan menengah, peningkatan ketimpangan pendapatan dalam negara mempunyai hubungan positif dan signifikan dengan pertumbuhan ekonomi berikutnya.
4. Sutarno & Mudrajad Kuncoro (2003) melakukan penelitian tentang pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan antar kecamatan di Kabupaten Banyumas pada tahun 1993-2000. Dengan menggunakan alat analisis Tipologi Klassen, Indeks Williamson, Indeks Theil, dan Trend Korelasi Pearson. Hasil penelitian menunjukkan dari 27 kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas terdapat 7 kecamatan yang termasuk daerah cepat maju dan cepat tumbuh, 3 kecamatan termasuk daerah maju dan tertekan, 6 kecamatan termasuk kecamatan berkembang cepat, dan sisanya sebanyak 11 kecamatan termasuk daerah relatif tertinggal. Rata-rata Indeks Williamson dan Indeks Entropi Theil selama periode 1993-1997 masing-masing sebesar 0,426 dan 0,039. Hasil keduanya menunjukkan terjadinya kecenderungan peningkatan ketimpangan di Kabupaten Banyumas. Selain itu pembuktian Hipotesis Kuznets berlaku di Kabupaten Banyumas.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Alat analisis	Hasil Penelitian
1.	Person dan Tabellini (1994)	<i>Is Inequality Harmful for Economic Growth?</i>	Pertumbuhan ekonomi dan Ketimpangan	Panel data	Kesenjangan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan
2.	Sjafrizal (1997)	Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat tahun 1997	PDRB, PDRB perkapita, Jumlah penduduk, Laju pertumbuhan ekonomi	Tipologi Klassen, Indeks Williamson	Dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum angka ketimpangan regional untuk wilayah Indonesia bagian barat ternyata lebih rendah dibandingkan dengan angka ketimpangan untuk Indonesia secara keseluruhan. Hasil dari Tipologi Klassen yang termasuk daerah maju dan tumbuh cepat adalah Sumatera Utara, Riau dan Kalimantan Barat. Daerah berkembang cepat adalah Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan. Sedangkan daerah yang relatif tertinggal adalah Jambi dan Bengkulu.
3.	Forbes Kristin (2000)	<i>Reassessment of the Relationship Between Inequality and Growth</i>	Pertumbuhan ekonomi dan Ketimpangan	Panel Data	Kesenjangan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan
4.	Sutarno dan Mudrajad Kuncoro (2003)	Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Kecamatan di Kabupaten Banyumas, 1993-2000	Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Wilayah	Tipologi Klassen, Indeks Williamson, Indeks Entropi Theil, trend dan Korelasi Pearson	Selama periode pengamatan terjadi kecenderungan peningkatan ketimpangan antar kecamatan di Kabupaten Banyumas yang salah satunya diakibatkan konsentrasi aktivitas ekonomi secara spasial serta Hipotesis U-Terbalik Kuznet berlaku di Kabupaten Banyumas.

2.3 Kerangka Pemikiran

Pembangunan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan ekonomi daerah pada dasarnya dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah.

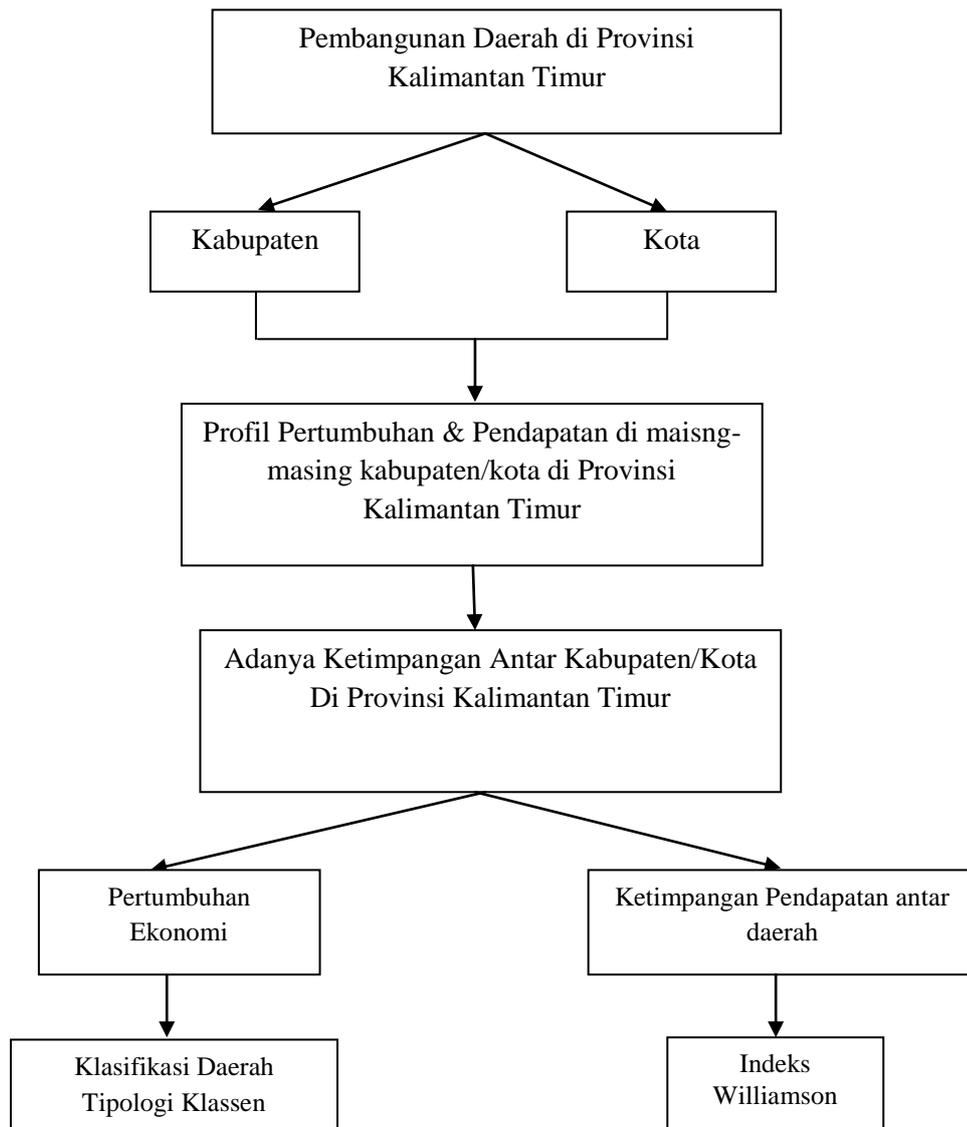
Pada umumnya pertumbuhan ekonomi yang dialami oleh setiap daerah adalah berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena masing-masing daerah memiliki perbedaan potensi sumber daya yang tidak sama. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah yang dapat dilihat melalui PDRB serta pendapatan perkapita. PDRB merupakan indikator yang digunakan dalam mengukur kemajuan ekonomi suatu daerah, sedangkan pendapatan per kapita merupakan indikator yang seringkali dijadikan ukuran kesejahteraan suatu masyarakat yaitu merupakan hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk.

Untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah digunakan alat analisis Tipologi Klassen, yang akan mengelompokkan daerah ke dalam empat kuadran yaitu daerah maju dan cepat tumbuh (Kuadran I), daerah berkembang cepat (Kuadran II), daerah relatif tertinggal (Kuadran III) dan daerah maju tapi tertekan (Kuadran IV).

Dalam penelitian ini distribusi pendapatan antar daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur diukur dengan menggunakan Indeks Williamson yang bernilai antara 0-1, semakin besar Indeks Williamson semakin besar pula ketimpangan pendapatan antar daerah yang terjadi, sebaliknya jika Indeks Williamson semakin kecil (mendekati 0) maka semakin merata.

Berikut ini adalah skema jalan pemikiran penelitian tersebut yang dapat dilihat pada Gambar 2.1 :

Gambar 2.1
KERANGKA PEMIKIRAN



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel penelitian ialah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2004), sedangkan definisi operasional adalah definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut (Nazir,1988). Adapun variabel dan definisi operasional penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

3.1.1 Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari perubahan indikator ekonomi makro yaitu perubahan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga konstan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur, dengan satuan persen.

3.1.2 Ketimpangan pendapatan

Ketimpangan pendapatan adalah perbedaan pendapatan pada suatu daerah dengan daerah lain yang berada dalam suatu wilayah. Satuan yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan adalah Indeks Williamson.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data merupakan informasi yang didapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu, untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta (Abdurrahmat Fathoni, 2006). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian (Iqbal Hasan, 2002), sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada (Iqbal Hasan, 2002). Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi:

1. Data PDRB kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur atas dasar harga konstan 2000 tahun 2001-2009
2. Data PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2000 tahun 2001-2009
3. Data PDRB per kapita kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur atas dasar harga konstan 2000 tahun 2001-2009
4. Data PDRB per kapita Provinsi Kalimantan Timur atas dasar harga konstan 2000 tahun 2001-2009
5. Data PDRB Provinsi Kalimantan Timur atas dasar harga konstan 2000 tahun 2001-2009
6. Data jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Timur tahun 2001-2009
7. Data jumlah penduduk kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2001-2009
8. Data luas wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2001-2009

9. Peta administratif Provinsi Kalimantan Timur
10. Data realisasi investasi PMA dan PMDN Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur
11. Data realisasi investasi PMA dan PMDN Provinsi Kalimantan Timur
12. Data realisasi Produksi Migas Menurut Lokasi di Provinsi Kalimantan Timur
13. Data realisasi Produksi Batu Bara Menurut Lokasi dan Perusahaan di Provinsi Kalimantan Timur

Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari :

1. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
3. Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur
4. Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Kalimantan Timur
5. Literatur-literatur serta informasi tertulis baik yang berasal dari instansi terkait maupun internet, yang berhubungan dengan topik penelitian untuk memperoleh data sekunder.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data untuk data sekunder dilakukan dengan metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya (Suharsimi Arikunto, 2002). Penelitian ini mendokumentasikan data-data statistik yang merupakan publikasi dari Badan Pusat Statistik (BPS), dokumen-dokumen perencanaan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan sumber-sumber

pustaka lain yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Pengumpulan data primer diperoleh dengan melakukan wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, yaitu pertanyaan yang datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai (Abdurrahmat Fathoni, 2006), wawancara dilakukan langsung dengan petugas/pejabat lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang terkait dengan penelitian tersebut.

3.4 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan menggunakan peralatan analisis Ekonomi Regional. Analisis data yang digunakan sesuai dengan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.4.1 Analisis Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Untuk mengetahui pola pertumbuhan ekonomi daerah di kabupaten/kota di Kalimantan Timur digunakan Tipologi Klassen.

Tipologi Klassen

Alat Analisis Tipologi Klassen digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Tipologi Klassen pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita daerah. Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-rata pendapatan per kapita sebagai sumbu horizontal, daerah yang diamati dapat dibagi

menjadi empat klasifikasi yaitu : daerah maju dan cepat tumbuh (*Rapid Growth Region*), daerah maju tapi tertekan (*Retarded Region*), daerah berkembang cepat (*Growing Region*), dan daerah relatif tertinggal (*Relatively Backward Region*) (Sjafrizal, 1997).

Tabel 3.1
Pengelompokan Pembangunan Wilayah Berdasarkan Tipologi Klassen

Laju pertumbuhan (r) \ PDRB Per kapita (y)	$y_1 < y$	$y_1 > y$
	$r_1 > r$	(Kuadran II) Daerah Berkembang Cepat
$r_1 < r$	(Kuadran III) Daerah Relatif Tertinggal	(Kuadran IV) Daerah Maju Tapi Tertekan

Sumber : (Sjafrizal, 1997)

Keterangan :

- y_i = pendapatan perkapita kabupaten/kota
- y = pendapatan perkapita Kalimantan Timur
- r_i = laju pertumbuhan PDRB kabupaten/kota
- r = laju pertumbuhan PDRB Kalimantan Timur

3.4.2 Analisis Tingkat Ketimpangan Antar Daerah

Untuk menghitung tingkat ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan timur dengan menggunakan Indeks Williamson.

Indeks Williamson

Untuk mengetahui ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur, dapat dianalisis dengan menggunakan indeks ketimpangan regional yang dinamakan indeks Williamson. Indeks ini semula digunakan oleh Jeffrey G. Williamson dengan rumus (Sjafrizal, 2008) :

$$IW = \frac{\sqrt{\sum(y_i - y)^2 \cdot f_i / n}}{y} \dots\dots\dots (3.1)$$

Keterangan:

IW = Indeks Williamson

y_i = PDRB per kapita kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur

y = PDRB per kapita rata-rata seluruh daerah di Provinsi Kalimantan Timur

f_i = jumlah penduduk Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur

n = jumlah penduduk seluruh daerah di Provinsi Kalimantan Timur

Indeks Williamson berkisar antara $0 < IW < 1$, di mana semakin mendekati nol artinya wilayah tersebut semakin tidak timpang. Sedangkan bila mendekati satu maka semakin timpang wilayah yang diteliti (Sjafrizal, 2008).